



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISTEK, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2021 – 2022
Masa Persidangan ke-	: I (Satu)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja (Fisik dan Virtual)
Dengan	: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.
Hari/Tanggal	: Rabu, 8 September 2021.
Pukul	: 14.00 Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Dr. Abdul Fikri Faqih, MM/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabag Sekretariat Komisi X DPR RI.
Acara	: Pembahasan RKA-KL TA 2022
Hadir Komisi X DPR RI	: 32 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Sandiaga Salahuddin Uno (Menparekraf/Kepala Baparekraf RI) beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.24 WIB oleh **Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menparekraf/Kepala Baparekraf RI serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR RI menyetujui pagu sementara Kemenparekraf/Baparekraf RI pada RAPBN TA 2022 sebesar **Rp3.792.417.902.000** (*Tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

Per unit utama

(dalam ribuan rupiah)

NO	UNIT UTAMA	PAGU SEMENTARA RAPBN TA 2022	PERUBAHAN/ PERGESERAN	PAGU SEMENTARA RAPBN TA 2022 (Setelah Perubahan/ Pergeseran)
1	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	574.158.239	27.000.000	601.158.239
2	Inspektorat Utama	30.967.000		30.967.000
3	Deputi Bidang Kebijakan Strategis	70.023.381		70.023.381
4	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	317.906.563		317.906.563
5	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	218.668.000		218.668.000
6	Deputi Bidang Industri dan Investasi	172.592.000		172.592.000
7	Deputi Bidang Pemasaran	407.922.000	- 15.000.000	392.922.000
8	Deputi Bidang Pengembangan Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (<i>Events</i>)	382.322.000	- 12.000.000	370.322.000
9	Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif	184.353.000		184.353.000
10	Badan Pelaksana Otorita	191.228.882		191.228.882
11	UPT Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata	1.242.276.837		1.242.276.837
TOTAL		3.792.417.902		3.792.417.902

Per program

(dalam ribuan rupiah)

No	Program	Anggaran	Perubahan/ Pergeseran	Menjadi
1.	Program Dukungan Manajemen	1.066.429.392	27.000.000	1.093.429.392
2.	Program Kepariwisata dan Ekraf	1.703.983.464	-27.000.000	1.676.983.464
3.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.022.005.046		1.022.005.046
		3.792.417.902		3.792.417.902

- Komisi X DPR RI akan menyampaikan Pagu Sementara Kemenparekraf/Baparekraf RI pada RAPBN TA 2022 sebesar **Rp3.792.417.902.000** (*Tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua ribu rupiah*) sebagaimana angka 1 di atas kepada Badan Anggaran DPR RI.
- Komisi X DPR RI menekankan kepada Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk menjadikan pandangan dan masukan anggota Komisi X DPR RI dalam rangkaian pembahasan sejak pembahasan pembicaraan pendahuluan, pagu indikatif dan pagu sementara RAPBN TA 2022 (Raker 2 Juni 2021, RDP 9-10

Juni 2021, Raker 14 Juni 2021, Raker 1 September 2021, dan RDP 2 September 2021) sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan dan program Kemenparekraf/Baparekraf RI pada RAPBN TA 2022.

4. Selain pandangan dan masukan anggota Komisi X DPR RI sebagaimana angka 3 di atas, terkait pagu anggaran Kemenparekraf/Baparekraf RI pada RAPBN TA 2022, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan:
 - a. Pergeseran anggaran sebesar Rp27 Milyar dari program kepariwisataan dan ekraf ke program dukungan manajemen, agar digunakan untuk meningkatkan program pariwisata dan ekraf, antara lain untuk mendukung regulasi yang terkait pariwisata dan ekraf.
 - b. Meningkatkan koordinasi lebih intensif dengan K/L terkait yang melaksanakan fungsi pariwisata atau yang memiliki program-program kepariwisataan.
 - c. Persyaratan dan prosedur Bantuan Pemerintah (Banpem) bidang parekraf harus disusun dan dicantumkan dalam bentuk Juklak dan Juknis.
5. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI melakukan koordinasi dengan Kemenpora RI dalam rangka mendukung pelaksanaan PON XX di Papua yang akan dilaksanakan pada Oktober 2021.

III. PENUTUP

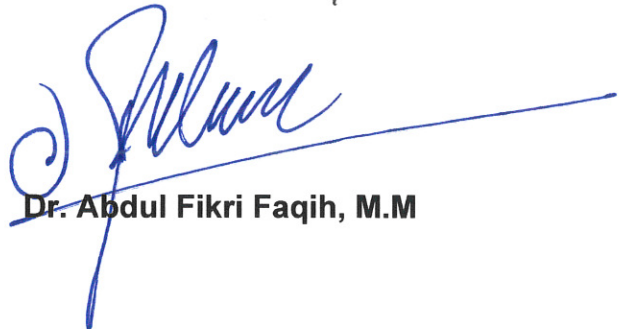
Rapat ditutup pukul 17.27.

**Menparekraf/
Kepala Baparekraf RI,**



Sandiaga Salahuddin Uno

Ketua Rapat,



Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M